

## WEWENANG PPK DALAM PENGADAAN BARANG JASA MENURUT PERPRES 12 TAHUN 2021 JO PERPRES 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

**Iskandar Ahmaddien**

Bada Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

**Email:** iskandar.ahmaddien@bps.go.id

### *Abstract*

*Deviation from purchasing procedures One type of corruption is the provision of government services and goods that harm the economy or state finances. These deviations often occur because officials do not understand and comply with regulations or do not pay enough attention. This position is very important because the Commitment Making Officer (PPK) is involved in every stage of the government procurement process. As a result, PPK competencies must pay attention to morality and ethics, managerial competence, and the acquisition of goods and services. Parameters according to paragraph (1) of Article 2 and Article 3 of Law no. as amended by Law no. 31 of 2009 Acts of abuse of authority against the law are considered as a component of the crime of PPK based on Article 20 of the 2001 Corruption Crime Prevention Law. obligation. In the sense of applying statutory, conceptual, and statutory approaches to relevant cases, this research is normative in nature (normative law research). main problem at hand.*

**Keywords:** *procurement of government goods/services; criminal liability; Commitment Making Officer (PPK).*

### **Abstrak**

Penyimpangan dari tata cara pembelian Salah satu jenis korupsi adalah pemberian jasa dan barang pemerintah yang merugikan perekonomian atau keuangan negara. Penyimpangan ini sering terjadi karena pejabat tidak memahami dan mentaati peraturan atau tidak memberikan perhatian yang cukup. Posisi ini sangat penting karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terlibat dalam setiap tahapan proses pengadaan pemerintah. Akibatnya, kompetensi PPK harus memperhatikan moralitas dan etika, kompetensi manajerial, dan perolehan barang dan jasa. Parameter sesuai dengan ayat (1) Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2009 Perbuatan penyalahgunaan wewenang secara melawan hukum dianggap sebagai komponen pidana PPK berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2001. Kewajiban dalam arti menerapkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perundang-undangan terhadap kasus-kasus yang relevan, maka penelitian ini bersifat normatif (normative law research). pokok permasalahan yang dihadapi.

**Kata kunci:** *pengadaan barang/jasa pemerintah; pertanggungjawaban pidana; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)*

## **PENDAHULUAN**

Karena merupakan sarana untuk menggunakan sejumlah besar anggaran internal organisasi guna memperoleh barang, jasa, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan misi organisasi. Pengadaan barang dan jasa memainkan peran penting dalam organisasi. Akuisisi barang dan jasa juga memainkan peran penting. (Kholby dkk, 2022).

Di tengah upaya menggenjot berbagai aspek pembangunan nasional, tumbuh aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan penyimpangan lainnya. Ini karena korupsi telah menghabiskan banyak uang negara, yang dapat menimbulkan masalah di berbagai bidang.

Dunia bisnis merupakan salah satu bidang globalisasi ekonomi bisnis yang baru berdiri. Hal ini terutama terjadi ketika produk atau layanan yang sama atau serupa ditawarkan, yang pada gilirannya dapat menggantikan produk atau layanan yang mereka sediakan sebelumnya. beli. Perkembangan iklim persaingan usaha tentunya akan terpengaruh oleh kondisi tersebut. (Wibowo,2015)

Lingkungan persaingan usaha yang kondusif akan menjamin terjadinya persaingan usaha yang sehat, jujur, dan adil. Pengusaha akan melakukan persaingan yang sehat untuk menjaga kualitas barang dan jasa yang dihasilkannya, sumber daya pendukung yang digunakannya untuk memproduksi barang dan jasa tersebut, serta jasa yang dihasilkannya agar tetap kompetitif di pasar. berikan kepada pelanggan, serta kestabilan harga jual produk dan jasa tersebut.

Persaingan bisnis yang sehat juga menguntungkan konsumen, yang bisa mendapatkan barang dan jasa berkualitas tinggi dengan harga yang wajar. (Wibowo,2015)

Ilustrasi pengadaan barang dan jasa adalah penyediaan berbagai fasilitas baru oleh suatu instansi pemerintah, berbagai gedung, dapat dibeli oleh bisnis milik negara, bisnis domestik dan internasional swasta, dan organisasi lainnya. Membeli produk dan layanan yang dirancang untuk memenuhi persyaratan bisnis atau lembaga pemerintah untuk produk dan layanan yang dapat meningkatkan kinerjanya adalah hal yang paling penting. (Mayendra, 2021)

Kegiatan yang dilakukan merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh suatu organisasi atau lembaga untuk memperoleh barang dan jasa (procurement). Suatu institusi atau bisnis menggunakan pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa yang digunakan untuk operasi. Proses standar untuk memproses barang dan jasa, mulai dari prosedur pemrosesan hingga laporan, sering digunakan dalam suatu organisasi. (Agus Arif Rakhman,2022).

Saat ini, sejumlah faktor dari Amerika Serikat dapat menyebabkan bisnis merugi, seperti kualitas tenaga kerja yang menjadi keunggulan kompetitif, dan kekurangan barang. Setiap bisnis mendapat manfaat dari penggunaan barang. Barang yang dibeli dapat dilakukan oleh karyawan dalam bisnis kecil, sedangkan dalam bisnis yang lebih besar, kemungkinan besar diperlukan pengesahan untuk menyelesaikan transaksi pembelian dalam jumlah besar.

Di era globalisasi modern, banyak tekanan pada satu bangsa untuk menerapkan strategi operasional dalam rangka melindungi kepentingan bangsa. Hal ini dikarenakan setiap bangsa memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan berbagai strategi pegawai yang relevan dengan kepentingan bangsa. (MAHROBI, 2012).

Pengadaan barang dan jasa adalah salah satu dari banyak hal yang perlu dilakukan perusahaan untuk memastikan bahwa karyawannya terlatih dengan baik untuk melakukan tugas operasional spesifik yang akan ditugaskan kepada mereka. (Patria, 2021)

Akuisisi barang setiap perusahaan berada di bawah lingkup pembelian. Istilah "pembelian barang" atau "pengadaan barang" juga berlaku untuk segala jenis pembelian barang. Jika pengadaan barang tidak ditangani dengan baik, barang tidak akan sampai, pengiriman yang salah, atau jumlah barang yang dikirim salah, yang merugikan bisnis.

Untuk menjaga persediaan perusahaan tetap stabil, proses pengadaan barang sangat penting. Tanpa langkah ini, suatu kegiatan tidak akan berhasil karena perusahaan tidak akan memiliki persediaan.

Istilah "pengadaan" mengacu pada setiap dan semua kegiatan yang terkait dengan pembelian barang dan dibiayai oleh anggaran perusahaan dan dilakukan secara efektif oleh pemasok barang dan manajemen. Prinsip umum pengadaan barang harus diikuti dalam praktiknya. (Laoh, 2020).

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, prinsip-prinsip berikut harus selalu dipegang: kualitas, biaya, pengiriman yang berfokus pada kualitas dan spesifikasi yang tepat, biaya optimal, pasokan, dan penyelesaian pekerjaan tepat waktu.

Ada beberapa prosedur pengadaan barang internal di Departemen Pengadaan Barang dan Bahan Baku. Secara tidak langsung, prosedur ini merupakan langkah awal untuk memastikan kelangsungan operasional perusahaan tanpa insiden.

## METODE

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, dimana peraturan perundang-undangan yang ada dikaji untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. 6 Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi diperiksa dengan pendekatan undang-undang dalam pemeriksaan ini; Pendekatan kasus, juga dikenal sebagai pendekatan historis, melihat kasus yang ditangani berdasarkan masalah yang dihadapi; Pendekatan konseptual berangkat dari pandangan dan doktrin ilmu hukum yang sudah mapan; Pendekatan historis, sebaliknya, melihat sejarah tentang apa yang dipelajari dan apa yang terjadi dalam latar masalah saat ini (Wibowo, 2015)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetensi, sebagaimana didefinisikan oleh Sedarmayanti, adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang didukung oleh sikap kerja yang profesional dan dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan.<sup>8</sup> Kompetensi merupakan sifat dasar yang dimiliki oleh seseorang yang berpengaruh langsung atau dapat memprediksi kinerja pekerjaan yang sangat baik.

Di era globalisasi modern, banyak tekanan pada satu bangsa untuk menerapkan strategi operasional dalam rangka melindungi kepentingan bangsa. Hal ini dikarenakan setiap bangsa memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan berbagai strategi pegawai yang relevan dengan kepentingan bangsa.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun

2021 (selanjutnya disebut Keputusan Presiden Nomor 12). 12 Tahun 2021), butir 1 disebutkan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa adalah proses perolehan barang dan jasa dari kementerian, lembaga, dan perangkat daerah yang dibiayai oleh ABPN/APBD, diawali dengan identifikasi kebutuhan dan berlanjut sampai ke pemindahan pekerjaan.

Di tengah upaya menggenjot berbagai aspek pembangunan nasional, tumbuh aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan penyimpangan lainnya. Ini karena korupsi telah menghabiskan banyak uang negara, yang dapat menimbulkan masalah di berbagai bidang.

Dunia bisnis merupakan salah satu bidang globalisasi ekonomi yang diminati banyak orang Indonesia. Munculnya pengusaha baru Indonesia dan asing yang beroperasi di segmentasi pasar yang sama tentu akan menjadi ancaman bagi bisnis yang baru berdiri. Hal ini terutama terjadi ketika produk atau layanan yang sama atau serupa ditawarkan, yang pada gilirannya dapat menggantikan produk atau layanan yang mereka sediakan sebelumnya. Perkembangan iklim persaingan usaha tentunya akan terpengaruh oleh kondisi tersebut.

Berdasarkan penelitiannya, standar pengklasifikasian kompetensi PPK adalah skala pekerjaan di bidang manajemen pengadaan pemerintah, yang dapat dikategorikan sederhana hingga kompleks.

Untuk PPK Tipe C, pekerjaan yang termasuk dalam kategori manajemen kontrak sederhana dan ditangani oleh PPK adalah pekerjaan yang bersifat operasional, rutin, standar, dan/atau berulang atau berulang, seperti pembelian alat tulis kantor, rapat, dan cleaning service.

Menurut hukum, setiap tindakan memiliki konsekuensi yang harus dijelaskan. Dalam hal pertanggungjawaban dalam hukum pidana, Simon merumuskan dua pandangan berikut yang sering digunakan dalam doktrin hukum pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana: monistik dan monisme.

Aliran pemikiran monistik berpendapat bahwa jika seseorang melakukan sesuatu yang ilegal dan dapat dihukum oleh hukum, mereka dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Teori aliran mengatakan bahwa unsur-unsur strafbaar feit mencakup unsur-unsur tindakan yang biasa, yang disebut sebagai unsur-unsur objektif, dan unsur-unsur penyusun, yang disebut sebagai unsur-unsur subjektif. Oleh karena itu, jika Anda menggabungkan berbagai komponen, Anda sampai pada kesimpulan bahwa strafbaar feit setara dengan ketentuan kejahatan musim gugur; akibatnya, seolah-olah diyakini bahwa pelakunya pasti akan dihukum jika ada strafbaar feit. (Nur, 2022).

Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melawan aturan. Hukum larangan memuat ancaman (sanksi) berupa hukuman khusus bagi mereka yang melanggar hukum. Dapat juga dikatakan bahwa suatu perbuatan pidana adalah perbuatan melawan hukum dan dapat dipidana, sepanjang tetap diingat bahwa ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menyebabkan terjadinya peristiwa itu, sedangkan undang-undang melarang perbuatan itu. yaitu situasi atau peristiwa yang disebabkan oleh perilaku orang).

Pelaksanaan tanggung jawab PPK mengakibatkan pembatasan sejumlah kewajiban hukum, antara lain yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum pidana, dan administrasi hukum. PPK mempunyai hubungan hukum dan konsep pertanggungjawaban pidana adalah kelalaian. Akibatnya, PPK umumnya bertanggung jawab atas parameter. Penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian merupakan tindak pidana, baik disengaja maupun tidak.

Dalam hal ditemukan kesalahan administrasi PPK sebagai komponen tindak pidana korupsi, maka penyimpangan tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Untuk menjamin bahwa, kedudukan PPK tetap memerlukan keahlian manajerial. Tidak bisa dipungkiri, posisi PPK tidak ideal untuk mengawasi proses pengadaan barang dan jasa karena memiliki tanggung jawab tambahan selain tanggung jawab utama PNS. Tim pendukung dan tim ahli harus dibentuk untuk membantu PPK dalam pekerjaan mereka..

Aliran pemikiran monistik berpendapat bahwa jika seseorang melakukan sesuatu yang ilegal dan dapat dihukum oleh hukum, mereka dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Teori aliran mengatakan bahwa unsur-unsur strafbaar feit mencakup unsur-unsur tindakan yang biasa, yang disebut sebagai unsur-unsur objektif, dan unsur-unsur penyusun, yang disebut sebagai unsur-unsur subjektif. Oleh karena itu, jika Anda menggabungkan berbagai komponen, Anda sampai pada kesimpulan bahwa strafbaar feit setara dengan ketentuan kejahatan musim gugur; akibatnya, seolah-olah diyakini bahwa pelakunya pasti akan dihukum jika ada strafbaar feit.

## SIMPULAN

Dalam proses pengadaan barang dan jasa, PPK seringkali berurusan dengan masalah kewenangan dan kepatuhan terhadap undang-undang. Pejabat PPK yang tidak mengetahui aturan yang mengatur proses pembelian barang dan jasa berisiko ceroboh atau lalai selama proses tersebut, yang dapat menjebloskan mereka ke balik jeruji besi.

Aliran pemikiran monistik berpendapat bahwa jika seseorang melakukan sesuatu yang ilegal dan dapat dihukum oleh hukum, mereka dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Teori aliran mengatakan bahwa unsur-unsur strafbaar feit mencakup unsur-unsur tindakan yang biasa, yang disebut sebagai unsur-unsur objektif, dan unsur-unsur penyusun, yang disebut sebagai unsur-unsur subjektif. Oleh karena itu, jika Anda menggabungkan berbagai komponen, Anda sampai pada kesimpulan bahwa strafbaar feit setara dengan ketentuan kejahatan musim gugur; akibatnya, seolah-olah diyakini bahwa pelakunya pasti akan dihukum jika ada strafbaar feit.

Di era globalisasi modern, banyak tekanan pada satu bangsa untuk menerapkan strategi operasional dalam rangka melindungi kepentingan bangsa. Hal ini dikarenakan setiap bangsa memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan berbagai strategi pegawai yang relevan dengan kepentingan bangsa.

Pertanggungjawaban pribadi dan pertanggungjawaban jabatan merupakan dua aspek tanggung jawab hukum PPK. Posisi pertanggungjawaban akan diberikan kepada PPK jika

melakukan tindakan penyimpangan berupa kesalahan administrasi (maladministrasi) selama proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebaliknya, PPK akan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila maladministrasi mengakibatkan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan korupsi; secara khusus, PPK akan dimintai pertanggungjawaban pidana, dan hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan tentunya adalah dua puluh tahun penjara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Arif Rakhman, M. M. (2022). Buku kerja komitmen resmi: Versi Perpres No. melalui Pengelupasan Kontrak Pengelolaan Dua Belas Tahun Tahun 2021, Edisi Ketiga. Prenada Media.
- E. Mayendra, 2021 Dalam pengadaan barang dan jasa, kewenangan notaris sebagai majelis sengketa (Disertasi Doktor, Universitas Islam Malang).
- Lubis, David H. Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Melakukan Kontrak dengan Penyedia Memiliki Perlindungan Hukum (Disertasi Doktor, Universitas Islam Riau).
- ISMIAWAFI, Francis A. Meneliti Akuisisi Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi dan Desain Tata Letak Bangunan Cagar Budaya Eks KPPN Malang Tahun Anggaran 2021 (Disertasi Doktor, Politeknik Keuangan Negara STAN).
- H. Triawan Triawan Pejabat Pembuat Komitmen Pelanggaran Tata Cara Hukum Pembelian Barang dan Jasa **SOSIALISASI: 11(1), 22-39, JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN DAN ILMU-ILMU SOSIAL.**
- M. Yatafao, R. Darmini, dan Y. T. Boy **STUDI YURIDIS SURAT PENUNJUKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEBAGAI PROYEK TATA NEGARA DAN KOMPETENSI KEADILAN MUTLAK (Disertasi Doktor, UNIVERSITAS BUNG HATTA).**
- P.R.E.S.I.D.E.N., REPUBLIK INDONESIA Perubahan atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden 12 Tahun 2021.
- Notaris dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah S. H. Fauzan Prasetya, M.Kn, S.H. Sonya Silvia, dan M.Kn. Guepedia.
- Nur, A. (2022). Pandangan Audit Forensik tentang Konspirasi Penipuan Antara Instrumen Negara dan Bisnis dalam Keuangan Negara dalam Pembelian Barang dan Jasa 2(3), 656–681, Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEBS).
- SH, M., dan Y. LAOH (2020). Kontribusi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk pemberantasan korupsi sastra Indonesia dari Rizmedia.
- P. Gultom Gultom **IMPLIKASI PRINSIP KEBEBASAN KONTRAK DALAM PERJANJIAN BARANG ANGKATAN UDARA 11(2) Jurnal Ilmiah Hukum Pengarahan.**

- Hasan, Y. A., S. R. Allo, M. Mas, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Praktik Antikorupsi.
- Kholby, A. S., Mulyandani, V. C., & Surya, R. T. (2022). Implementasi e-procurement dan kompetensi pegawai dalam pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa 3(1), 70-83, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia.
- Amalia, R., Y. S. Simamora, F. Kurniawan, B. O. Abrianto, dan Tinjauan hukum yang mengatur tentang pembelian barang dan jasa. Pers Universitas Airlangga.
- N. Hidayat, Hidayat, F. TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN OPERASIONAL PENGADAAN BARANG DAN JASA BRT TRANS SEMARANG (Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Ediwarman, E., & Sembiring, F.K. Penyidikan hukum atas penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai). 4(1), 37-46, JURNAL MERCATORIA.
- N. F. Istiqlallia, R. Ardelia, dan P. Ramadhanti Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembuat Kontrak (PPK) Pemerintah Dalam Pembelian Barang dan Jasa 129-134 Perspektif, 25(2).
- R. BAHRUDIN (2016) Menggunakan kewenangan pejabat untuk melakukan pembelian barang dan jasa pemerintah dengan itikad buruk (Disertasi Doktor, Universitas Airlangga).
- MAHROBI, Y. (2012). (Disertasi Doktor, UNIVERSITAS AIRLANGGA) KEWENANGAN PEJABAT UNTUK MEMBUAT KOMITMEN PENYELESAIAN TAGIHAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH PEMERINTAH
- Ediwarman, E., & Sembiring, F.K. Ilmu Hukum Tentang Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Kpa) dan Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk) (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai). 117-118 dalam JURNAL MERCATORIA, 4(2).
- Wuisan, Francis R. Kewajiban untuk membuat komitmen dalam pengadaan barang dan jasa resmi sebagai bagian dari upaya pencegahan kepatuhan. 2(9), LEX ET SOCIETATIS.
- N. Singgih, and R. A. Pater TINJAUAN PENGGUNA ANGGARAN (PA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (Si-RUP) DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU 1-11, Journal of Juristic Analysis, Januari 2001.
- R. A. Wibowo (2015) Apa Yang Sudah Dilakukan Dan Apa Yang Masih Perlu Dilakukan Untuk Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa? Integritas: 1(1), 37-60, Jurnal Antikorupsi.
- N. Patria, 2021 Kompetensi Pembelian Barang dan Jasa Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 5(1), 253-273, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi).



MARKANSYAH, ARKANSYAH Kajian Kantor Unit Bandar Udara: Peran Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Perhubungan

Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen Karena Merugikan Keuangan Negara Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Lubis, D.K.A., A. Syahrin, B. Ginting, dan H. Purba.

H. Marlina (2020). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Memiliki Perlindungan Hukum. 5(2), 192-202, Doktrin.